



# Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial KAJIAN

KUALITAS PELAYANAN URUSAN PENSIUN DI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

*Agus Triharyadi dan Retnowati*

MENCARI FORMAT PEMILIHAN UMUM YANG IDEAL DI INDONESIA

*Endang Sulastri*

KEPENTINGAN EKONOMI-POLITIK DAN IDENTITAS POLITIK:  
STUDI KASUS KLAIM KESULTANAN SULU ATAS WILAYAH SABAH

*Debbie Affianty*

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
MELALUI MIKRO KREDIT HOME INDUSTRI

*Sa'diyah El Adawiyah*

HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN EKSISTENSI FUNDAMENTALISME

*Lusi Andriyani*

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KAJIAN

Volume 24

Nomor 2

Hlm 1-82

Jakarta  
Juli 2014

ISSN :  
0852-6060

## KEPENTINGAN EKONOMI-POLITIK DAN IDENTITAS POLITIK: STUDI KASUS KLAIM KESULTANAN SULU ATAS WILAYAH SABAH

Oleh: Debbie Affianty

### *Abstract*

*This article is a desk review or literature study about the root causes of Sulu Sultanate's claim over Sabah, Malaysia in 2013.<sup>1</sup> It will explore how economical and political interests have exacerbated the existing historical claims between the Sulu Sultanate, the Government of Philippines, and the Government of Malaysia. This research aims at answering questions that include: how the Sulu Sultanate formulates its identity as a separate entity from the Philippines? and what issues are brought by this distinct identity? The research is conducted through qualitative method, describing more on the claim made by Sulu Sultanate over Sabah, Malaysia and explaining the relation between the state and identity politics, as well as factors that cause the standoff in early 2013.*

*Keywords: Economic, Political Interest, Government*

### **Pendahuluan**

Identitas berperan besar dalam sistem internasional saat ini karena banyak mempengaruhi konstelasi politik internasional yang terkait dengan perbatasan negara. Identitas merupakan salah satu elemen dalam membangun perbatasan, dan perbatasan memperkuat kedaulatan negara melalui wilayah yang jelas. Banyak negara saat ini yang harus merubah perbatasan wilayahnya akibat adanya konflik yang terkait dengan identitas.

Banyaknya negara-negara baru dan konflik etnis telah membuat sebuah tantangan baru terhadap konsep negara yang berdaulat seperti yang telah disepakati pada tahun 1648 dalam Perjanjian Westphalia. Perjanjian yang menyepakati konsep kehendak untuk mengatur diri sendiri (*self-determination*) itu, pada akhirnya menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok etnis maupun minoritas untuk meminta otonomi bahkan memisahkan diri dari pemerintahan dan negara induknya. Diharapkan pemisahan tersebut bisa menciptakan sebuah negara yang seragam di mana penduduknya memiliki kesamaan identitas, seperti persamaan etnis, agama dan budaya.

Identitas mengikat sebuah kelompok karena adanya kesamaan ras, etnis, latar belakang budaya dan keyakinan agama. Kecenderungan saat ini adalah upaya penciptaan identitas berdasarkan keyakinan, ketimbang bangsa. Terkadang alasan utama terjadinya konflik adalah untuk membentuk sebuah negara baru walaupun berasal dari bangsa yang sama, seperti misalnya Sudan dan Sudan Selatan.

---

<sup>1</sup> Artikel ini sebagian besar menggunakan hasil penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Klaim Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah di Malaysia (2013): Analisa Melalui Perspektif Konstruktivisme" yang dilakukan oleh penulis pada Mei-Oktober 2013, dengan dana hibah penelitian dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sistem negara bangsa (*nation states*) saat ini seringkali menyebabkan entitas yang semula merupakan mayoritas dan berkuasa tiba-tiba menjadi minoritas. Penciptaan “kita” (*self*) dan “mereka” (*the other*) seringkali terjadi ketika ada satu identitas yang dominan, merasa lebih tinggi dari identitas kelompok lain. Akibatnya, ada satu budaya yang mendominasi budaya lain. Terkadang kalangan minoritas dipaksa untuk menerima konsep *imagine community* di mana mereka harus mengabaikan kekhasan mereka seperti agama, etnisitas, ras, bahasa, dan budaya atas nama “nasionalisme”. Mereka tidak memiliki hak untuk menjalankan kehidupannya berdasarkan budaya dan agama yang mereka peluk, atau menggunakan bahasa dari nenek moyang mereka. Namun sebenarnya, mereka tetap berkeinginan untuk melestarikan apa yang mereka banggakan sebagai entitas yang “unik”.

Ketika kaum minoritas ditekan, terpinggirkan dan hak-hak mereka ditolak, maka mereka akan menuntut pengakuan internasional agar haknya bisa dipenuhi. Caranya yaitu melalui tuntutan untuk otonomi, penentuan nasib sendiri, atau tuntutan berpisah dari negara induk. Seringkali hal ini dilakukan tidak melalui proses damai, melainkan melalui kekerasan dan pembunuhan, bahkan perang saudara.

Banyak komunitas minoritas saat ini yang tinggal di wilayah perbatasan. Menurut Che Man, ada tiga jenis minoritas dalam hal ini. Pertama, populasi imigran minoritas yang tidak memiliki ikatan teritori apa pun dengan wilayah di mana mereka tinggal selama mereka mendapat akses yang setara ke kesempatan ekonomi dan pelayanan sosial. Kedua, penduduk asli yang menjadi minoritas di *homeland* mereka sendiri akibat penjajahan. Mereka tetap mempertahankan kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik mereka tetapi menghadapi keharusan untuk berasimilasi dengan populasi mayoritas. Ketiga, orang-orang yang dimasukkan ke dalam *nation-states* baru setelah penguasa kolonial meninggalkan daerah jajahan administratif perdagangan, dan hubungan internasional dengan negara-negara lain. Masuknya penjajah ke wilayah mereka tidak diterima dan seringkali dilawan dengan pemberontakan. Ketika penguasa kolonial memberikan kemerdekaan kepada koloni mereka, wilayah orang-orang ini kemudian digabungkan ke dalam *nation-states* yang baru. Dengan sejarah kemerdekaan mereka dan cara pandang yang berbeda, orang-orang ini mengklaim mereka berasal dari bangsa yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Identitas mereka selalu terkait dengan *homeland* tradisional mereka.<sup>2</sup> Bangsamoro di Filipina bisa dimasukkan ke dalam kategori ketiga, keterkaitan sejarah mereka dengan kaum Muslim di Asia Tenggara selalu membuat mereka merasa mereka bagian dari *ummah* di kawasan tersebut.

---

<sup>2</sup> (1990:1-2) Che Man, W. K. (1990) *Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand*, Quezon City: Ateneo de Manila University Press.

Identitas kelompok etnis memiliki konsekuensi politik di dalam hubungan internasional. Dalam politik internasional, identitas etnis seringkali dikaitkan dengan klaim-klaim terhadap wilayah yang diyakini sebagai “*homeland*” eksklusif milik kelompok etnis tertentu. Ideologi yang melegitimasi klaim ini merupakan doktrin nasionalis eksklusif yang seringkali disebut sebagai “nasionalisme etnis.” Nasionalisme etnis merupakan kepercayaan bahwa anggota-anggota dari kelompok etnis tertentu adalah sebuah “bangsa”—bagian dari keluarga besar dengan hak-hak intrinsik terhadap sebuah tanah tertentu. Kemudian mereka meyakini bahwa kelompok-kelompok lain mungkin menghuni atau mengklaim tanah yang sama tidak memiliki hak yang sama. Keyakinan ini memiliki kekuatan emosi tertentu, yang memberikan kelompok-kelompok etnis sumber solidaritas yang krusial serta memperkuat identitas etnisnya.

Proses di mana kelompok-kelompok identitas etnis mendapatkan atau ingin mendapatkan *homeland* mereka sendiri bisa berlangsung damai, seperti Czech dan Slovakia atau berujung kekerasan seperti Serbia dan Kroasia. Namun ada pula kelompok-kelompok etnis yang nyaman dengan status etnis minoritas di dalam “*homeland*” sebuah kelompok etnis yang dominan, walaupun mereka memiliki beberapa keterbatasan, seperti kelompok Muslim di Singapura.

Identitas kolektif di antara orang-orang dengan identitas sama kemudian memperkuat pemahaman bahwa nasib dan kelangsungan hidup serta kesejahteraan mereka bergantung pada apa yang terjadi terhadap kelompok mereka. Perasaan nasib bersama ini seringkali tercipta karena adanya ancaman bersama terhadap kelompok.<sup>3</sup>

Ketika eksistensi identitas dari sebuah kelompok terganggu karena satu atau lain alasan, maka ada tiga aspek yang akan terganggu, yaitu identitas, perbatasan dan tatanan (*good order*). Kesultanan Sulu adalah salah satu contohnya. Rajah Mudah (putra mahkota) Agbimuddin Kiram dari Kesultanan Sulu memimpin sekitar 234 orang etnis Tausug untuk mengambil kembali tanah warisan leluhurnya di Sabah.<sup>4</sup> Sebagian dari mereka bersenjata dan mengaku sebagai Tentara Diraja Kesultanan Sulu, mereka mendarat dan membangun permukiman sementara di Lahad Datu (salah satu pantai di Negara Bagian Sabah), Malaysia pada 9 Februari 2013.

Para pengikut Sultan Sulu itu mengklaim Sabah, kawasan seluas 74.000 kilometer persegi, dari titik wilayah Sungai Pandassan di pesisir barat laut sampai seluruh pesisir pantai timur hingga Sungai Sibuco di bagian selatan. Keturunan Kesultanan Sulu mengklaim wilayah ini mencakup daerah Paitan, Sugut, Bangaya, Labuk, Sandakan, Kina Batangan, sampai ke selatan di Teluk

<sup>3</sup> Wendt, A. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hal. 353.

<sup>4</sup> *Masa Lalu yang Belum Tuntas di Sabah*, Kompas, 5 Maret 2013.

Darvel.<sup>5</sup>Pihak Malaysia kemudian memberikan respons dengan operasi militer yang menyebabkan korban tewas mencapai 75 orang, termasuk satu orang militer dan delapan orang polisi Malaysia.

Tulisan ini akan membahas tentang beberapa hal terkait klaim dan penyerangan Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah di Malaysia pada tahun 2013. Pemaparan permasalahan tersebut akan berfokus pada beberapa pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Kesultanan Sulu merumuskan identitas diri dan rakyatnya sebagai bagian yang terpisah dari Filipina?; Isu apa saja yang muncul akibat pembedaan identitas tersebut?; dan Apakah hal ini lebih didorong oleh faktor-faktor terkait dengan identitas atau akibat kegagalan institusi negara dalam mengelola entitas minoritas yang memiliki identitas berbeda dengan mayoritas?

### **DINAMIKA POLITIK KESULTANAN SULU**

Sulu adalah salah satu provinsi di Filipina yang termasuk di dalam the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). Terletak di bagian selatan negara tersebut dan terdiri dari lebih dari 157 pulau-pulau yang tersebar dan terisolir, beberapa pulau di wilayah Sulu masih tidak bernama. Wilayah kepulauan Sulu terbagi menjadi empat, yaitu gugusan Jolo, gugusan Pangutaran, gugusan Tongkil-Banguingui (Samales), dan gugusan Siasi-Tupal. Meskipun terdiri dari campuran penduduk Muslim dan Kristen, etnis Tausug mendominasi Kepulauan Sulu.<sup>6</sup>

Kesultanan Sulu atau The Royal Sultanate of Sulu adalah sebuah monarki Islam tradisional dari etnis Tausug, sebuah entitas yang saat ini berada di bawah pemerintahan Republik Filipina. Wilayah Kesultanan mencakup berbagai pulau dan daerah di dalam dan di sekitar Laut Sulu, seperti Pulau Palawan, Tawi-Tawi, Sabah, Sulu, Basilan dan Zamboanga. Bagi kalangan Tausug, Raja atau Sultan memiliki hak-hak kedaulatan tertinggi atas wilayah utara dari Borneo, yang saat ini dianggap “dipinjam” oleh Malaysia dan dikelola sebagai negara bagian Sabah.<sup>7</sup> Berikut adalah peta dari wilayah Kesultanan Sulu:

---

<sup>5</sup>Klaim Wilayah Sulu Buka Kotak Pandora, Kompas, 13 Maret 2013

<sup>6</sup>Sulu, <http://www.philippine-islands.ph/en/sulu-philippines.html>.

<sup>7</sup>The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadjja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.



Awalnya pada tahun 1390-an, seorang penakluk dari Minangkabau Raja Baginda, memperkenalkan banyak hal-hal baru di Sulu secara damai. Sebelum kedatangan Baginda, dakwah Islam dilakukan di kawasan tersebut oleh pendakwah besar, Karim-ul Makdum, tetapi adat dan ritual musyrik (kemungkinan di kalangan Hindu) dari masyarakat lokal, masih dipelihara sampai Raja memeluk monoteisme. Baginda tidak memiliki keturunan laki-laki dan kekuasaannya menjadi mahar bagi putrinya, Ratu (Dayang-Dayang) Paramisuli. Diyakini bahwa ibu dari Paramisuli adalah keturunan dari tetua masyarakat setempat yang terkenal.<sup>8</sup>

Pria yang menikahi Paramisuli adalah Sayyid Abu Bakr Akbirin, seorang bangsawan, pengacaradan ahli teologi. Sebagai seorang anak dari ayah Arab yang kelahiran Mekkah (dan, menurut beberapa pengarang, dari ibu seorang putri Melayu), Abu Bakr dibesarkan di Johor. Baginda kemudian menunjuk Abu Bakr sebagai keturunannya dan mengangkatnya sebagai kepala bidang hukum yang mengurus masalah-masalah duniawi dan spiritual.<sup>9</sup>

Selama memerintah, Abu Bakr tidak hanya mampu mempertahankan kekuasaan terpusat yang dibentuk oleh ayah mertuanya, tetapi juga mengembangkannya dengan baik serta membentuk lembaga politik berupa Kesultanan – sebuah monarki teokratis di mana ia menjadi penguasa sakral,

<sup>8</sup> H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, *The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey*, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>9</sup> H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, *The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey*, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

sebagai pemimpin yang berdaulat dan religius, seorang “Paduka Mahasari Maulana al-Sultan Sharif-ul-Hāshim” dan memerintah sekitar tahun 1450 dan 1480.<sup>10</sup>

Abu Bakr kemudian membagi kepulauan Mindanao menjadi lima daerah dan memasukkan semua pesisir serta wilayah daratan di sekitar tempat tinggalnya ke dalam wilayah kekuasaan Sultan. Sultan memperluas pengaruhnya sampai pesisir Sulu dan menjadi kekuatan maritim yang besar. Kekuasaan dan pengaruhnya menjangkau wilayah-wilayah yang jaraknya dekat maupun jauh, sebagaimana digambarkan oleh lambang Sulu, sebuah keris dan sebuah tombak.<sup>11</sup>

Di bawah kepemimpinan anak Abu Bakr, Sultan Kamal ud-Din dan Ala ud-Din, bangsa Tausug menghadapi ekspansi bangsa Eropa, tetapi untuk waktu yang lama mereka mampu melawannya. Dari waktu ke waktu, bangsa Eropa menginvasi wilayah Kesultanan dan bahkan ibu kota Jolo dikuasai beberapa kali, namun bangsa Tausug tetap bertahan. Misionaris Kristen dikabarkan hanya ada sementara saja.<sup>12</sup>

Sultan selanjutnya adalah Sultan Alim ud-Din yang diberi gelar pada tahun 1750, sebagai Raja Ferdinand I dari Sulu. Namun ia menghadapi oposisi baik dari kerabatnya maupun dari pengikutnyadan, dan dipenjarakan oleh komandan Spanyol tidak lama setelah penobatannya tersebut. Ketika Sultan memperoleh kemerdekaan dan takhta (dengan bantuan dari tentara Inggris), ia memilih untuk bertindak sebagai “Amir ul-Mu’minin” (pemimpin) Jihad dan dikenal di kalangan Tausug dengan nama tersebut.<sup>13</sup>

Baik Ali mud-Din, maupun anaknya yang bernama Sultan Israel menghadapi ketidakstabilan yang berkembang di dalam Kesultanan dan di dalam *Royal House*, yang dipicu oleh tekanan dari luar. Sejak ia berkuasa, garis pergantian kepemimpinan tradisional dirubah beberapa kali, demi alasan politis, sebagai akibat dari berbagai bentuk gerakan “anti-Sultan” (anggota-anggota dari cabang dinasti yang lebih muda atau bahkan dari kerabat yang terkait).<sup>14</sup>

Karena peperangan dan penaklukan, rute perdagangan regional dan antar-regional berubah secara drastis, Kesultanan kehilangan arti pentingnya. Pelabuhannya dikendalikan oleh bangsa Eropa,

---

<sup>10</sup> Abhoud Syed M. Lingga, *Philippines: The Muslim Minorities*, [http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com\\_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=](http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=)

<sup>11</sup> The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>12</sup> The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>13</sup> The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>14</sup> The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

penggunaan kapal-kapal uap dan pertempuran yang terus-menerus mengurangi kekuatan kapal-kapaldan pelabuhan Tausug; akibatnya, sebagian besar energi maritim Tausug berubah menjadi perompakan lokal ketimbang perdagangan biasa. Pada tahun 1851, setelah penyerangan Jenderal Urbiztondo, Sultan Mohammad Pulalun dipaksa untuk menandatangani pakta yang mengubah Kesultanan menjadi sebuah propinsi otonom, bagian dari kerajaan Spanyol. Menurut naskah perjanjian berbahasa Spanyol, Sultan menyerahkan hak-hak kekuasaannya kepada Spanyol; sementara naskah berbahasa Tausug hanya mengakui kedaulatan utama dari Spanyol, hak-hak prerogatif Sultan tetap ada. Kekuasaan Spanyol kemudian menduduki ibukota Kesultanan Jolo pada tahun 1876, namun secara *de facto* maupun *de jure*, otonomi luas dari Kesultanan tetap ada.<sup>15</sup>

Ketika Spanyol menduduki Filipina tahun 1885, wilayah Kesultanan Sulu di Mindanao diserahkan kepada Spanyol sementara wilayahnya yang di bagian timur Sabah dikuasai Inggris. Kesultanan Sulu telah melebur dengan Filipina pada tahun 1899, ketika Amerika Serikat mengambil alih Filipina dari Spanyol. Sejak itu, Kesultanan Sulu sekedar simbol kepemimpinan agama dan adat.

Sultan Jamal ul-Kiram (wafat tahun 1844) adalah yang pertama menggunakan nama “Kiram”; keturunannya merupakan pewaris kerajaan dari Bani Hasyim Sulu, yang darinya diturunkan semua Sultansyah berikutnya. Sultan ini adalah yang pertama kali dikenal sebagai sejarawan dari bangsanya; ia mengumpulkan berbagai legendadan kisah, yang bisa dipercaya dan mengatur kompilasi ini untuk anggota dewannya.<sup>16</sup>

Pada tahun 1962, Sultan Sulu Mohammad Esmail Kiram menyerahkan wilayah Kesultanan Sulu di bagian Timur Sabah (yang saat itu dikuasai Inggris) kepada Filipina dengan harapan akan memperjuangkan mendapatkan kembali wilayah tersebut. Namun satu tahun kemudian, wilayah Sabah menjadi salah satu negara bagian Malaysia.<sup>17</sup>

Sabah selama ini diketahui memiliki sumber daya alam yang besar. Wilayah itu terus berkembang dan menjadi sumber kesejahteraan bagi Malaysia dan penduduknya. Sebaliknya, Kepulauan Sulu sampai sekarang masih menjadi salah satu kawasan termiskin di Filipina.

Sabah merupakan bagian integral Malaysia yang diakui secara internasional, termasuk oleh Filipina. Akan banyak reaksi dan penolakan, khususnya dari Malaysia, untuk membuka kembali

---

<sup>15</sup>The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>16</sup> H.E. Datu Sadja Michael Y. Medvedev, The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>17</sup>Sangat Sulit Selesaikan Masalah Sulu, Kompas, 23 Maret 2013.



klaim Kesultanan Sulu atas sebagian wilayah timur Sabah ini. Perubahan klaim status Sabah juga berdampak luas, termasuk keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) atas wilayah Sipadan-Ligitan yang dianggap milik Kesultanan Sulu dan berada dalam wilayah administrasi Malaysia dengan menggunakan argumentasi *chain of title* (rangkaian kepemilikan dari Kesultanan Sulu) dalam sidang sengketa dengan Indonesia di mahkamah tersebut pada tahun 2002. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam urusan Sabah dengan menandatangani perjanjian Manila Accord pada 31 Juli 1963. Dalam perjanjian itu Indonesia dan Filipina menyambut baik berdirinya Federasi Malaysia, yang memasukkan sebagian wilayah Pulau Kalimantan (termasuk Borneo Utara atau Sabah), selama dukungan rakyat wilayah-wilayah tersebut dipastikan oleh otoritas independen dan tidak memihak, yakni Sekretaris Jenderal PBB atau pihak yang mewakili.<sup>18</sup>

Spainol memindahkan hak-hak dan klaim-klaimnya kepada Amerika dan menipu dengan versi dua bahasa pada tahun 1851 pun terulang, disengaja atau tidak, oleh wakil-wakil Amerika ketika Perjanjian Bates ditandatangani oleh Sultan Jamal ul-Kiram II. Namun kesepakatan ini, secara sepihak diakhiri oleh Amerika, membebaskan Sultan (walaupun dia memprotes) dari jaminan maupun kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini. Amerika berusaha untuk menjajah kawasan secara efektif sehingga menyebabkan “pemberontakan Moro”. Perang tersebut menyebabkan peristiwa-peristiwa tragis dan kehilangan jiwa yang banyak. Pada tahun 1915, kesepakatan baru ditandatangani. Sebenarnya Jamal ul-Kiram II dipaksa oleh Gubernur Amerika Frank W. Carpenter untuk menghentikan kekuasaannya yang besar dan hak-hak prerogatifnya demi kepentingan Amerika, dan menerima pemerintahan Amerika langsung di Sulu. Namun, bertolak-belakang dengan apa yang diumumkan oleh Carpenter, perjanjian tersebut tidak menghilangkan kekuasaan sultan secara keseluruhan. Carpenter, penguasa yang cukup bersahabat, rencana damainya ditentang oleh para pejabat yang lebih suka berperang, dan terjadi perselisihan yang menuntut adanya perjanjian baru. Namun demikian, peran religius Sultan tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Kekuasaan Jamal ul-Kiram II berlanjut di bawah pemerintahan Amerika dan Filipina sampai wafatnya pada tahun 1936, ketika Manila mengabaikan eksistensi Kesultanan secara bersamaan, dan menolak memberikan pengakuan, apalagi bentuk dukungan apa pun kepada Sultan yang baru, Muwallil Wasit II. Keputusan pemerintah yang ceroboh ini diikuti dengan pembunuhan sultan yang baru tersebut, dan mengakibatkan kekacauan politik yang lebih jauh dan faksi-faksi dinasti baru.

---

<sup>18</sup>RI Diharapkan Berperan, Kompas, 22 Maret 2013.

<sup>19</sup>The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadjja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

Selama Perang Dunia II, ada dua pihak yang terus melakukan klaim secara aktif terhadap jabatan sultan, yang satu mendapat dukungan dari Jepang dan yang lainnya menolak pendudukan Jepang; tidak satupun dari mereka yang berasal dari jalur Bangsawan Kiram. Namun jabatan tersebut dikembalikan secara pribadi kepada pewaris yang dianggap sah, Mohammad Esmail Kiram I (anak dari Muwallil Wasit), pada tahun 1955.<sup>20</sup>

Pengembalian ini secara resmi diakui oleh Republik Filipina pada tahun 1962 dan pada tahun 1972, seiring dengan semakin tertariknya pemerintah Manila kepada masalah-masalah Sulu, sebagian karena perselisihan Borneo Utara, dan sebagian lain karena semakin berkembangnya sikap radikal dalam gerakan Moro yang menuntut pemisahan dan otonomi, yang mana penguasa kerajaan tradisional sepertinya (sejak dulu sampai sekarang) masih menjadi sebuah pilihan yang masuk akal.<sup>21</sup>

#### A. PEMBERIAN SABAH OLEH BRUNEI KEPADA KESULTANAN SULU

Menurut Silsilah Keluarga Kerajaan Sulu (*The Genealogy of the Sulu Royal Families*) yang ditulis oleh Sururul-Ain Ututalum (keturunan dari Ratu Hadja Piandao dan, pewaris Sabah) serta Abdul-Karim Hedjazi, yang menelusuri hubungan dekat antara keluarga kerajaan Brunei dan Sulu, pada tahun 1500-an, Sultan Brunei Bolkiah menikah dengan Putri Sulu yaitu Putri Laila, cucu dari Shariful Hashim, Sultan Pertama Sulu.<sup>22</sup>

Beberapa sumber di Sulu dan Brunei menyatakan bahwa Sultan Ketujuh Sulu, Muhammad ul-Halim, berkerabat dengan keluarga Kerajaan Brunei. Ibu dari Sultan Badar ud-Din I adalah etnis Tirun dari pesisir utara Borneo. Ketika Gubernur Spanyol Corcuera menyerang Sulu pada tahun 1638, Rajah Bongso, Sultan Sulu saat itu, juga dibantu oleh tentara dari Makassar.<sup>23</sup>

Pada tahun 1658, terjadi sengketa tentang siapa yang berhak menjadi penguasa di Brunei. Sultan Sulu pun diminta oleh Sultan Muaddin dari Brunei untuk menyelesaikan konflik sebagai penengah. Ketika negosiasi gagal, Sultan menggunakan tentaranya untuk mendukung salah satu pihak yang mengklaim dan membantu menghentikan perang sipil. Sultan Sulu kemudian dihadiahi oleh Sultan Brunei wilayah Sabah, bagian utara dari Kalimantan (Borneo) yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kepemilikan tersebut termasuk “daratan dari pulau Borneo mulai dari Sungai Pandassan di pesisir barat daya dan sepanjang pesisir timur sampai Sungai Sibuco di selatan dan

<sup>20</sup>The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadjja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>21</sup>The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadjja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>22</sup>The Royal House of Sulu (Royal Sultanate of Sulu): A Historical Survey, by H.E. Datu Sadjja Michael Y. Medvedev, <http://www.royalsultanateofsulu.org/#!/history> diakses 18 Juli 2013.

<sup>23</sup> Abhoud Syed M. Lingga, *Philippines: The Muslim Minorities*, [http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com\\_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=](http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=)

terdiri atas Kota Paitan, Sugut, Bangaya, Labuk, Sandakan, Kina Batangan, Mumiang, dan wilayah-wilayah lain serta kota-kota ke arah selatan yang membatasi Teluk Darvel dan sepanjang Sungai Sibuco dengan semua pulau di dalam perjanjian.<sup>24</sup>

## B. STATUS “SEWA” SABAH OLEH MALAYSIA

Pada tahun 1763, Sultan Azimuddin menandatangani sebuah perjanjian yang mengizinkan Perusahaan Dagang Inggris (the British East Indies Co.) menggunakan Sabah dan wilayah-wilayah lainnya. Ketegangan kemudian berkembang antara Sultan dan perusahaan tersebut, yang menghambat pelaksanaan perjanjian sampai tahun 1878.

Pada masa penjajahan Inggris, tahun 1878, Jamal ul-A'lam, yang kemudian menjadi Sultan, menyewakan Sabah kepada Baron Von Overbeck dari the British East India Trading Co melalui sebuah perjanjian sewa atau *padjak*. Wilayah Sabah kemudian disewa oleh British North Borneo Company dengan membayar uang pajak senilai 1.600 dolar AS per tahun. Dalam kontrak disebutkan bahwa uang sewa akan terus dibayarkan selama Sabah masih dalam kekuasaan perusahaan tersebut. British North Borneo Co pada tahun 1946 menyerahkan hak-hak kedaulatannya atas Sabah kepada Inggris. Ketika Federasi Malaya mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris tahun 1963, Sabah menjadi salah satu wilayah yang dikembalikan kepada Federasi Malaysia yang baru berdiri.<sup>25</sup> Hingga kini, Malaysia masih membayar sekitar 5300 Ringgit Malaysia (Rp 15,6 juta) per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu. Jumlah tersebut saat ini setara dengan harga sewa sebuah rumah di Kuala Lumpur selama satu bulan. Keturunan sultan, karena itu berupaya untuk menegosiasikan ulang makna *padjak* dengan Pemerintah Malaysia.<sup>26</sup>

Secara sepihak Inggris menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda dari sebelumnya. Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah. Sementara pihak Kesultanan Sulu menganggap uang pajak tersebut tetap sekadar uang sewa atas wilayah mereka di Sabah. Status kepemilikan, menurut mereka, tak berubah.

Pertikaian berkisar pada pemaknaan *padjak*. *Padjak* dalam bahasa Tausug berarti sewa sementara versi Inggris menggunakan istilah itu untuk memaknai “hibah” atau “penyerahan”. Keturunan sultan beranggapan bahwa Sabah hanyalah disewakan kepada perusahaan sementara

<sup>24</sup> Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>25</sup> Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>26</sup> Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

Malaysia mengatakan bahwa Filipina tidak memiliki klaim karena Sabah sudah dijual kepada British East India Trading.

Sultan tetap secara *de jure* menjadi penguasa tertinggi di Borneo Utara dan terus menerima bayaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian awal. Hak-hak Sultan dibenarkan oleh hukum perundang-undangan dan pemerintahan di Sabah dan Malaysia, dan tidak satu pun dari Perjanjian Bates maupun Perjanjian Carpenter yang mempengaruhi hak-hak kebangsawanan ini dalam hal apa pun, karena AS secara eksplisit menolak dari ikut campur dalam urusan yang rumit ini.

### C. FILIPINA DAN KESULTANAN SULU

Banyak politisi penting di Filipina menganggap Borneo Utara sebagai bagian dari Kesultanan Sulu dan karenanya menjadi bagian dari Filipina. Oleh karena itu klaim atas Sabah akan tergantung pada eksistensi Kesultanan. Untuk mendapatkan pengakuan resmi dari Manila atas eksistensi Kesultanan Sulu (yang secara tidak langsung memberi kesempatan untuk membentuk kembali otonomi Tausug), Sultan Sulu Mohammad Esmail Kiram dua kali (tahun 1962<sup>27</sup> dan tahun 1969) menandatangani undang-undang penyerahan Borneo Utara kepada Republik Filipina. Namun perjanjian yang terakhir gagal mengimplementasikan pasal-pasal dari undang-undang tersebut. Kedua undang-undang ini akhirnya tidak bermakna. Kasus Borneo Utara tetap menjadi masalah hukum dan politik yang rumit.<sup>28</sup>

Pemerintah Filipina telah mengklaim Sabah sejak pemerintahan Presiden Diosdado Macapagal. Klaim tersebut berawal dari hak-hak kedaulatan Kesultanan Sulu atas Sabah, yang diberikan kepada Pemerintah Filipina. Klaim kepemilikan dari keturunan Sulu atas Sabah, berasal dari keputusan pengadilan Inggris ketika Malaysia masih di bawah pemerintahan Inggris.

Alm Duta Besar Abraham Rasul, adalah *wazir* atau Perdana Menteri bagi Sultan Esmail Kiram (dan kemudian *wazir* bagi Sultan Mahakuttah, anak dari Esmail), diberi kuasa oleh sultan untuk mendiskusikan klaim terhadap Sabah dengan Macapagal dan, kemudian dengan Presiden Ferdinand Marcos. (Dubes Rasul menggantikan ayahnya, senator Muslim pertama, Hadji Butu, yang menjadi *wazir* untuk tiga sultan.)<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Pada tahun 1962, Sultan menyerahkan wilayah Kesultanan Sulu di bagian Timur Sabah (yang saat itu dikuasai Inggris) kepada Filipina dengan harapan akan memperjuangkan mendapatkan kembali wilayah tersebut. Namun satu tahun kemudian, wilayah Sabah menjadi salah satu negara bagian Malaysia.

<sup>28</sup> *Sangat Sulit Selesaikan Masalah Sulu*, Kompas, 23 Maret 2013.

<sup>29</sup> Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

Esmail Kiram secara resmi memindahkan kekuasaan kesultanan dan kedaulatan kepada Pemerintah Filipina pada tanggal 12 September, 1962 melalui sebuah instrumen tertulis yang ditandatangani oleh dirinya dan Menteri Luar Negeri Emmanuel Pelaez. Pindahan tersebut diotorisasi oleh sebuah resolusi yang dikeluarkan oleh “Ruma Bhecara” (setara dengan Kabinet). Ia kemudian memberikan hak-hak kedaulatan Kesultanan Sulu atas Sabah kepada Pemerintah Filipina, namun mempertahankan hak-hak kepemilikan atas wilayah tersebut.<sup>30</sup>

Namun, ada aturan dalam resolusi Ruma Bechara bahwa jika pemerintah gagal atau menolak untuk melindungi klaimnya, Kesultanan Sulu berhak untuk mengambil langkah hukum atas klaimnya di Sabah, dalam bentuk apa pun. Pengacara Keluarga Kiram, Ulka Ulama, dan mantan Senator Santanina Rasul memiliki dokumen-dokumen yang menjelaskan hal tersebut.<sup>31</sup>

Pada tahun 1974, Sultan Esmail wafat dan digantikan oleh anaknya sebagai pewaris sah, yaitu Mohammad Mahakuttah Kiram. Naiknya Sultan baru secara serius diakui oleh Presiden Filipina, di bawah undang-undang Manila yang mengakui tidak hanya status pribadi dari Sultan sebagai penguasa tetapi juga pembentukan pemerintahan Sulu. Perwakilan presiden menghadiri upacara penobatan Yang Mulia Sultan Mahakutta pada 24 Mei 1974. Pada kesempatan ini, anak Mahakutta dan pewarisnya Datu Muedzul-Lail ditetapkan (dan secara resmi diakui oleh negara Filipina) sebagai Raja Muda (Prince Royal atau pewaris yang sah).

Sultan Mahakutta wafat pada tahun 1986 ketika situasi politik di Filipina sangat berbeda; kekuasaan tersebut beralih dari diktator Ferdinand Marcos ke pemimpin yang suka bereksperimen, Corazón Aquino, sudut pandangnya tidak tentu dan ketidakstabilan politik di tanah Moro meningkat secara dramatis. Manila menolak mendukung sultan yang baru. Raja Muda Muedzul-Lail disarankan tidak mengurus penobatan tanpa pengakuan dari Manila, juga tidak mencampuradukkan kekuasaan dengan perjuangan antara kalangan yang ingin memisahkan diri dengan yang ingin tetap bergabung dengan Republik. Oleh karena itu Muedzul-Lail memilih untuk sementara waktu, tetap sebagai Raja Muda dan Yang Dipertuan Agung ketimbang mengambil gelar Sultan, meskipun itu berarti bahwa keputusan ini, menurut adat Sulu, membuatnya tidak bisa memegang kendali kepemimpinan Kesultanan maupun mempunyai hak-hak prerogatif sebagai penguasa.

---

<sup>30</sup>Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>31</sup> “Jika klaim kedaulatan atas Sabah dilepaskan, apakah kami kehilangan semua hak? Kalaupun kami kehilangan hak kedaulatan atas Sabah, kami masih memiliki hak-hak kepemilikan, melalui keturunan Sultan, yang secara pribadi memiliki Sabah”, Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013.

Karena keadaan politik yang kacau, struktur tradisional dari Kesultanan secara prinsip tidak stabil dan banyak pihak yang hanya berpura-pura mulai mengklaim takhta, untuk mengisi kesenjangan imajiner di kepemimpinan. Beberapa upacara penobatan pura-pura dilaksanakan. Bahkan paman Muedzul-Lail, Datu Fouad, yang ditunjuk oleh keponakannya sebagai gubernur dari Borneo Utara, gagal menahan godaan dan menggunakan kesempatan ini untuk mengaku sebagai Sultan baik di Sulu maupun di Sabah. Semua upaya-upaya yang tidak sah ini agak berbeda jauh dengan sikap Raja Muda Muedzul-Lail yang diam-diam konsisten dan realistis dengan kebijakannya untuk mengembalikan kekuasaan secara perlahan. Saat ini Raja Muda berfungsi sebagai penguasa dengan skala penuh, dibantu oleh majelis tradisional dari para bangsawan dan tokoh terkemuka, Ruma Bechara. Pewaris Kesultanan berikutnya adalah anak tertua Raja Muda, yaitu Mohammad Ehsan S. Kiram, yang saat ini bergelar Maharaja Adinda (“pewaris kedua” atau “pewaris dari pewaris”). Kelima anak Raja Muda menjamin suksesi Kiram yang solid.

Agenda Raja Muda adalah menyatukan rakyatnya, baik kalangan bangsawan tradisional maupun masyarakat awam, pemukim dari bangsa Tausug maupun non-Tausug; untuk mendapatkan pengakuan dari Republik Filipina atas praktek sosial tradisional dari bangsa Tausug, di mana hukum Filipina saat ini menawarkan sebuah kesempatan. Selain itu ia juga ingin membangkitkan kembali hubungan konstruktif dengan rumah—rumah sah yang Melayu maupun non-Melayu sebagai bagian integral dari agenda Raja Muda yang tidak bisa tercapai tanpa kehati-hatian dan kesabaran, juga harus dengan inisiatif yang kuat.

Raja Muda Muedzul-Lail kemudian mempersiapkan pengembalian kekuasaan dan penobatan sultan dengan menyiapkan bendera dan beberapa simbol Kesultanan. Sejak dahulu kala, bangsa Tausug menggunakan bendera yang berbeda-beda untuk menandai rumah dan kapal penguasa. Dari praktek ini kemudian muncul penggunaan bendera Kerajaan pada abad ke-19. Awalnya warna putih mendominasi namun selanjutnya warna merah yang mendominasi karena pengaruh umbul-umbul ketika terjadi pertempuran. Bentuk khas pada bendera dan umbul-umbul mungkin berasal dari bentuk pintu masuk ibukota Kerajaan (Jolo) atau rumah (Istana); namun sekarang menjadi penanda pintu masuk Mekkah. Elemen lainnya disatukan dari bendera lama yaitu dua buah pedang sakral, sebagai simbol dari otoritas tertinggi Sultan. Dua buah garis, biasanya biru dan putih, sering muncul pada saat pengibaran bendera. Di bawah protektorat dan pendudukan Amerika, Sultan diminta menghentikan menggunakan bendera lama; dan sebuah bendera baru, yang diinspirasi oleh bendera Amerika diperkenalkan, juga merah, hanya dengan tambahan gambar bintang berwarna biru (untuk menandakan lima wilayah dari Kesultanan). Senjata tradisional Tausug (keris dan tombak, komposisi simbolis yang disebutkan di atas, dari waktu ke waktu disempurnakan dengan pisau

besar)berada pada latar belakang merah dari bendera baru ini dan juga simbol bulan sabit Islam, yang digantikan dengan lingkaran putih, seperti mewakili bentuk mutiara.Beberapa upaya dibuat untuk membuat lambang Kesultanan yang tepat tetapi untuk waktu yang lama simbol-simbol utusan yang digunakan tetap dipertahankan untuk mencerminkan tradisi Sulu yang otentik.

Pada tahun 2011, Raja Muda, dibantu oleh Ruma Bechara, secara hukum menetapkan lambang dan bendera Sulu yang baru. Bendera tersebut mencerminkan tingkat historis yang berbeda dari simbol Kesultanan, menunjukkan Pintu masuk Mekkah yang sangat megah secara simbolis di atas dua pedang dan emblem nasional keris dan tombak. Dua garis (dari warna-warna seragam kerajaan, biru dan putih) dan propinsi (meskipun dengan komposisi baru) tetap dipertahankan, dan juga mutiara.Lambang tersebut ada tiga dan menunjukkan Pintu Masuk Mekkah dengan Dua Pedang (untuk Sultan Sulu), bulan bintang Islam disempurnakan dengan api kesucian (untuk keturunan Bani Hasyim dan otoritas spiritual), serta sebuah payungdi atas perahu Kalimantan beratap yang menyimbolkan hak Kerajaan atas Borneo Utara. Pada acara-acara yang kurang besar, bagian inti bisa dibawa sendiri.Lambang tersebut dibawa oleh utusan mahkota Kerajaan Sulu.Pendukungnya adalah dua singa laut yang memegang keris dan tombak.Selain itu juga ada topi upacara Kerajaan, gambar burung pada lingkaran mahkota, pita di rumah kediaman, jubah Kerajaan, umbul-umbul, slogan dan motto.Lambang nasional juga membentuk lambang Kerajaan Sulu, dan saat ini dibawa oleh Raja Muda.

Kesultanan Sulu telah memiliki tradisi diperintah oleh satu orang Sultan, didukung dan diakui oleh rakyat kesultanan.Yang terakhir mengaku sebagai sultan adalah Sultan Mahakuttah Kiram, anak dari Esmail Kiram.Mahakuttah, diakui oleh Marcos, sementara ayahnya diakui oleh Messrs. Macapagal dan Marcos.Jamalul III diakui oleh Arroyo, dan bahkan dimasukkan menjadi calon Senatorpada tahun 2004.Dia menjadi sultanyang paling kuat dan terlihat.<sup>32</sup>

Sayangnya sampai tahun 2013 ada sekitar lebih dari 10 orang yang mengklaim sebagai Sultan.Di antaranya adalah Sultan Jamalul III dan adiknya Sultan Esmail.Jamalul adalah putra tertua dari Datu Punjungan Kiram.Awalnya, Datu Punjungan adalah raja muda atau putra mahkota dari Sultan Esmail Kiram.Namun setelah Datu Punjungan meninggalkan Filipina dan bermukim di Sabah, Sultan Esmail takut bahwa Datu Punjungan akan menandatangani penghentian klaim untuk membantu Malaysia, sehingga ia mengganti putra mahkotanya, dengan persetujuan dan otoritas dari Ruma Bechara-nya. Esmail menobatkan putra tertuanya, Mahakuttah Kiram, sebagai putra mahkota.Ketika Esmail wafat, Mahakuttah naik tahta dan penobatannya diatur oleh Marcosuntuk

---

<sup>32</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

menjaga klaim Sabah. Mahakuttah telah menandai anaknya, Muedzul-Lail sebagai raja muda. Waktu itu Muedzul-Lail masih sekolah.<sup>33</sup>Sebelumnya, Misuari meminta perhatian Malaysia untuk menyelesaikan masalah Sabah. Istri pertama Misuari, alm. Desdemona Tan, dan istrinya yang sekarang Ruayda, adalah pewaris Sabah karena mereka adalah keturunan Ratu Hadja Piandao, yang diakui memiliki hak atas 3/8 dari wilayah Sabah.<sup>34</sup>

Pada tahun 1962 Filipina mengajukan klaim atas Sabah ke PBB. Sebuah Divisi untuk Sabah dibentuk di Kementerian Luar Negeri.<sup>35</sup>Pada tahun 1967, di zaman Marcos, Filipina memiliki rencana untuk “mendestabilisasi” Sabah. Ia membentuk pasukan berisikan dua ratus tentara pemuda Muslim dari bangsa Sulu dan Mindanau, yang kemudian terkenal dengan nama Jabidah Special Force sesuai nama komandannya, Jabidah. Mereka dilatih secara khusus di pulau Corregidor di wilayah Luzon - Filipina, tanpa tahu tujuan sebenarnya. Skenarionya: Pemerintah kemudian akan masuk dan mengambil Sabah dengan cara militer, untuk “melindungi” ribuan orang Tausug yang hidup di sana atau memprovokasi mereka untuk melepaskan diri dan bergabung dengan Pemerintah Filipina. Rencana tersebut tidak berjalan lancar. Pada tahun 1968, tatkala mereka akan dikirim ke Sabah untuk membantai bangsa Sulu dan Mindanau di Sabah yang setuju ikut Malaysia melalui Referendum 16 September 1963, mereka menolak untuk memerangi saudaranya sendiri. Akhirnya, seluruh anggota Unit Komando Jabidah dibantai di pulau tersebut atas perintah Marcos. Hanya satu yang berhasil selamat, Jibin Arula. Jauh dari barak ketika ia mendengar suara letusan senjata, Arula mengklaim melihat teman-temannya disembelih oleh para pelatih militer. Ia berlari ke pegunungan, menuruni jurang dan menceburkan diri ke laut. Ia diselamatkan keesokan harinya oleh nelayan Cavite. Kemudian ia dibawa ke Gubernur Cavite Delfin Montano yang kemudian membawa Arula ke Senator Benigno Aquino yang kemudian mengekspos “Pembantaian Jabidah” yang terkenal pada tanggal 18 Maret, 1968. Inilah peristiwa yang membuat bangsa Moro demonstrasi berbulan-bulan di Manila, Mindanau dan Sulu, yang akhirnya melahirkan pembentukan MNLF untuk melawan Filipina.<sup>36</sup>

Malaysia mengalami hubungan diplomatik yang memburuk dengan Filipina setelah terbongkarnya insiden tersebut. Berkat upaya dari Indonesia, Singapura dan Thailand maka kondisi tersebut dapat diselesaikan.<sup>37</sup>Sementara itu, Presiden Corazon C. Aquino ingin menyelesaikan klaim

---

<sup>33</sup>Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>34</sup>Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>35</sup>Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>36</sup>Habib Rizieq

<sup>37</sup>Amina Rasul, “The Sabah Standoff”, <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013



tersebut selama kepemimpinannya. Sepertinya Malaysia hanya akan setuju untuk bernegosiasi jika semua pewaris sepakat untuk satu suara. Pada tahun 1987, ia menginstruksikan Menteri Luar Negeri Raul Manglapus untuk mengumpulkan semua pewaris bersama-sama. Pada 23 Oktober 1987, Manglapus menulis kepada Dubes Rasul: "Saya ingin menyarankan para pewaris mengatur agar mereka bisa pada posisi yang sama ... Meskipun klaim Anda adalah sebuah klaim pribadi, kami memiliki jaminan dari Pemerintah Malaysia bahwa mereka siap dan ingin bernegosiasi dengan pewaris dari Sultan Sulu untuk menyelesaikan masalah ini."

Senator Santanina Rasul diminta untuk mengkoordinasikan penyatuan para pewaris. Sebagai kepala stafnya, Amina Rasul diminta untuk menjalankan tugas ini. Ia membawa mereka semua ke istana Malacañang. Setelah beberapa jam berunding, para pewaris menunjuk perwakilan mereka yang dipimpin oleh Manglapus untuk bernegosiasi dengan Malaysia. Sayangnya pertemuan tersebut menemui jalan buntu ketika Jamalul III tidak setuju. Pewaris dari Ratu Hadji Piandao Kiram, Sultan Esmail Kiram, Putri Tarhata, Sakinur-in and Sitti Mariam berunding dengan Manglapus. Kutipan dari pertemuan tersebut yang diadakan pada 6 Desember 1987 menyatakan: "Mereka beranggapan bahwa Sultan Mohamad Jamalul Kiram III menyatakan pandangan pribadinya yang melanggar kesepakatan yang sudah dicapai pada perundingan para pewaris dengan Menteri ... Manglapus di PICC pada 4 Desember 4 dan pada pertemuan para pewaris yang diadakan dengan Presiden Corazon C. Aquino di istana Malacañang pada 5 Desember."<sup>38</sup>

Di masa kepemimpinannya, Presiden Fidel V. Ramos berupaya menyatukan para pewaris. Berdasarkan sarannya, perwakilan dari para pewaris bertemu pada 10 Februari 1993 untuk mendiskusikan pembentukan Sulu-Sabah Development Corp., yang akan bertanggungjawab terhadap pembangunan ekonomi dan pengembangan sosial budaya dari Sulu. Dipahami bahwa entitas ini akan menjadi upaya penyelesaian klaim kepemilikan atas Sabah. Mantan Dewan Hukum Presiden (sekarang Mahkamah Agung) Antonio Carpio membuat rancangan naskah dari ketentuan tersebut. Kerjasama ini akan kuat jika gagasan tersebut telah berjalan.<sup>39</sup>

Mengapa upaya-upaya ini tidak berhasil? Selama masa kepemimpinan Ramos, para pewaris masih tidak dapat bersatu. Selanjutnya, gagasan untuk mendirikan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area berkembang. Malaysia memperkerjakan ratusan ribu orang Filipina serta melakukan investasi di Mindanao. Terorisme berkembang dan perbatasan diamankan.

<sup>38</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>39</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

Klaim Sabah kembali membara. Situasi ini terus berlanjut sampai masa pemerintahan Estrada yang singkat.<sup>40</sup>

Pemerintahan Arroyo memperbaharui penyelesaian klaim tersebut. Beberapa dari pewaris dikenal di istana Malacañang pada tahun 2002 dan Jamalul III diangkat sebagai Sultan Sulu. Presiden Gloria Macapagal-Arroyo bahkan memberi surat dari Sultan Jamalul dan Putri Tajmahal, yang menanyakan perihal pengaturan harga sewa, kepada Perdana Menteri Mahathir. Pemerintahan Arroyo, namun tidak menyatukan semua pewaris, karena pengaturan sebelumnya telah dilakukan.<sup>41</sup>

Filipina selalu mengklaim Sabah sebagai bagian wilayahnya dengan menggunakan dokumen Kesultanan Sulu. Itulah sebabnya, kenapa Filipina tetap mempertahankan keberadaan "Sultan Sulu" bukan "Kesultanan Sulu", agar bisa dijadikan "alat politik" untuk menuntut Sabah.

### **FAKTOR POLITIK**

Klaim Sulu atas Sabah, mempunyai keterkaitan dengan perundingan antara Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF). Perundingan yang dimediasi oleh Malaysia pada Oktober 2012 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Mindanao termasuk juga Sulu sebagai wilayah otonomi dan diberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen oleh Mindanao. Sangat disayangkan pemerintahan di bawah Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, tidak mempertimbangkan klaim Sabah sebagai masalah utama yang dapat menghambat efektivitas Malaysia sebagai fasilitator dalam menyelesaikan kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan MILF. Hal ini, terlepas dari pernyataan para pemimpin Moro pada tahun 2001 yang mempertanyakan pilihan Malaysia sebagai fasilitator di tengah-tengah klaim atas Sabah. Malaysia sudah memfasilitasi proses perdamaian antara GPH-MILF sejak tahun 2001 dan membantu keamanan dan pembangunan di Filipina Selatan.<sup>42</sup>

Selain itu, beredar isu dari Malaysia bahwa insiden ini mungkin direkayasa oleh politisi lokal untuk mendestabilisasi partai berkuasa, UMNO, dengan menciptakan ketakutan di antara para penduduk Sabah. Pemerintah Malaysia, di bawah kepemimpinan UMNO, telah mendukung penuh proses perdamaian dengan the Moro Islamic Liberation Front. Berita-berita dari Malaysia menduga bahwa meskipun Perdana Menteri Najib Razak populer, UMNO bisa kehilangan dukungan. Jika

---

<sup>40</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>41</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>42</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

kecenderungan ini terus berlangsung, maka oposisi yang dipimpin Datuk Anwar Ibrahim bisa mempunyai kekuatan untuk menantang UMNO pada Pemilu bulan Juni 2013.<sup>43</sup>

The Moro National Liberation Front, di bawah kepemimpinan Nur Misuari, telah melakukan pertemuan di Zamboanga City sejak 20 Februari 2013 tentang situasi terbaru di Sabah ini. Menurut Amina Rasul, pertemuan tersebut melibatkan pemimpin-pemimpin Muslim dari pulau-pulau di Mindanao, para pemimpin tersebut menuntut dukungan bagi para pengikut Sultan namun menyerukan resolusi damai bagi kebuntuan tersebut.<sup>44</sup>

Aksi para utusan Kesultanan Sulu tersebut terjadi tak lama setelah Pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Filipina Selatan menandatangani kesepakatan damai pada Oktober 2012. Beberapa saat sebelum kesepakatan damai ditandatangani, Jamalul Kiram III, Sultan Sulu saat ini, merasa dikhianati lantaran tanpa alasan jelas dikecualikan dari proses perundingan, yang difasilitasi Malaysia itu. Hal ini membuat sentimen primordialisme terbuka kembali dan menimbulkan efek negatifnya. Kesetiaan terhadap pemimpin kemudian memperkukuh identitas mereka dan menyebabkan para pengikut pemimpin tersebut rela melakukan sebuah tindakan kekerasan untuk melindungi identitas dan kepentingan eksistensi kelompok mereka. Seperti yang dikatakan oleh anak perempuan Kiram, Jacel Kiram, bahwa ini adalah persoalan kehormatan. "Mereka tak akan kembali ke sini karena kehormatan lebih berharga daripada nyawa. Apalah artinya hidup tanpa kehormatan?" ujarnya kepada stasiun radio DZBB di Manila.<sup>45</sup>

## FAKTOR EKONOMI

Sabah selama ini diketahui memiliki sumber daya alam yang besar. Wilayah itu terus berkembang dan menjadi sumber kesejahteraan bagi Malaysia dan penduduknya. Sebaliknya, Kepulauan Sulu sampai sekarang masih menjadi salah satu kawasan termiskin di Filipina.

Kini banyak muncul kerabat Kesultanan Sulu atau pihak lain yang mengatas-namakan Kesultanan Sulu, menobatkan diri sebagai Sultan Sulu. Salah satu sebabnya adalah karena banyak yang ingin mendapatkan "Uang Sewa Sabah" berikut aneka fasilitas dan pelayanan

<sup>43</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>44</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>45</sup>*PM Malaysia: Pintu Negosiasi Tertutup*, Kompas, 3 Maret 2013

khusus. Pemerintah Malaysia sendiri melalui Kedutaan Besarnya di Manila, masih tetap membayar sewa tersebut kepada keluarga Kiram, dengan alasan karena diakui sebagai Sultan sah oleh pihak pemerintah Filipina. Malaysia membayar sewa untuk "pribadi" keluarga Kiram yang dipelihara oleh pemerintah Filipina, bukan untuk rakyat dan negara Sulu.

Saling klaim tak cuma terjadi atas wilayah Sabah, tahta kesultanan Sulu pun menjadi sengketa.<sup>46</sup> Amina Rasul, pemimpin Convenor Dewan Islam dan Demokrasi Filipina, mengatakan mungkin ada lebih dari 10 orang yang menuntut sebagai sultan di Sulu, empat di antaranya Kiram, sebuah dinasti yang berasal dari keturunan ke-33 Sultan Esmael Kiram I.

Muedzul-Lail Tan Kiram menyatakan sebagai pemimpin yang sah dari keluarga Kiram. Muedzul adalah putra dan putra mahkota yang ditunjuk dari Mahakuttah Kiram, sultan terakhir yang dikenal sebelum mangkat. Tapi kerabat Kiram lain telah mencitrakan diri sebagai sultan yang sah. Menurut sebuah artikel di Times Manila oleh berita kolumnis Tausug Julmunir Jannaral, kakak Mahakuttah itu, Fuad Kiram, adalah sultan yang sah. "Berdasarkan hukum yang berlaku umum, dari ayah ke anak yang sulung adalah hukum suksesi, Sultan Fuad adalah Sultan karena masuk dalam urutan pewaris tahta, jabatan dan posisinya sang ayahnya yakni Sultan Esmael E. Kiram I," tulis Jannaral.

Namun para penuntut gelar sultan lebih diketahui sejahtera jika dibandingkan dengan Jamalul Kiram III, yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Kota Taguig, dan mungkin bisa menjadi Sultan Sulu yang paling dikenal. Jamalul menjadi berita utama sejak dia memerintahkan pengikutnya awal Februari lalu untuk melakukan penyanderaan di Sabah. Rasul mengatakan beberapa anggota dari garis keturunan Kiram keberatan dengan kepemimpinan Jamalul, karena Jamalul bukanlah anak seorang sultan. Jamalul adalah putra Datu Punjungan Kiram, yang merupakan putra mahkota Sultan Esmael Kiram I namun kemudian dicabut gelarnya. Bahkan Esmail, saudara kandung Jamalul juga mengklaim diri sebagai sultan.

Perwakilan dari Datu Abinasser Sultan Badaruddin D. Mohammad Bataraza menyatakan sebagai Sultan Sulu yang sah, karena ia adalah keturunan dari istri pertama Sultan Sulu Jamalul Alam. Jamalul Alam adalah sultan yang menandatangani perjanjian tahun 1878 untuk menyewakan Sabah kepada North Borneo Company milik Inggris. Menurut dokumen dilengkapi Inquirer,

---

<sup>46</sup>Gelar Sultan Sulu Juga Jadi Sengketa, 13 Maret 2013.

perwakilan Badaruddin ini telah lama berusaha untuk mendapatkan Presiden Aquino mengakuinya sebagai sultan Sulu yang sah pada tanggal 25 Juli 2012. Bahkan upaya Badaruddin bukan hanya itu. Pada 24 Oktober 2012, perwakilan Badaruddin menyurati Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon untuk meminta bantuan dalam mendapatkan pengakuan sebagai sultan Sulu yang sah. Pihak Badaruddin bahkan mengatakan mereka siap menyajikan dokumen terkait dan artefak, termasuk segel emas, mahkota, ikat pinggang dan koin yang disimpan oleh keluarga sultan.

Sejak kematian sultan ke-34, Mahakuttah, Jamalul yang lahir hanya dari seorang pangeran putra mahkota dan bukan dari ayah sultan yang sah malah segera ditetapkan sebagai Sultan Sulu ke-35 yang diakui. Bagaimanapun keturunan seorang sultan atau bukan, Jamalul III telah dikenal di Sulu sebagai sultan Sulu yang sah, menurut para ahli. Lagipula, hingga kini, bangsawan Sulu juga tidak pernah menggelar pertemuan untuk membahas masalah tersebut.

Rasul mengatakan putusan pengadilan menunjukkan bahwa Jamalul III hanyalah salah satu dari penuntut hak atas Sabah. Semua ahli waris utama telah meninggal, dan meninggalkan ribuan ahli waris dari ahli waris. Tapi untuk saat ini, situasilah yang menentukan ketika para pendukung Jamalul III berada di Sabah mengorbankan hidup mereka dalam perjuangan untuk merebut wilayah berdasarkan kesepakatan sejarah. "Jamalul adalah sultan. Dia sudah diakui di dunia dan oleh konstituennya," kata Rasul.

Pemilik yang diakui secara syah -- anggota dari keluarga kerajaan dan bangsawan Sulu -- yang diakui pada tahun 1939 oleh Ketua Pengadilan C. F. C. Macaskie dari Pengadilan Tinggi Borneo Utara adalah: Ratu Hadji Piandao diakui memiliki saham besar sejumlah 3/8 dari wilayah. Putri Tarhata Kiram dan Putri Sakinur-In Kiram masing-masing memiliki 3/16 wilayah. Enam pewaris lain yang pergi ke pengadilan Macaskie mendapatkan 1/24 wilayah, yaitu: Mora Napsa, Sultan Esmail Kiram, Datu Punjungan, Sitti Mariam, Sitti Jahara dan Sitti Rada.<sup>47</sup>

Semua pewaris utama sudah wafat. Saat ini, mungkin terdapat ribuan pewaris dari pewaris. Ratu Hadji Piandao Kiram, adalah anak satu-satunya dan tidak memiliki anak. Oleh karena itu, sepupu-sepupunya, keponakan laki-laki dan keponakan perempuan akan membagi kepemilikannya yang berjumlah 3/8 dari wilayah. Di antara sepupu-sepupu tersebut adalah kakek dari Amina Rasul, yaitu, Hadja Salma, istri dari Senator Hadji Butu. Ayah dari Amina Rasul Alm. Dubes

---

<sup>47</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

Rasul, dan saudara kandungnya serta sepupu-sepupunya adalah pewaris. Istri Misuari (Alm. Desdemona dan Ruayda), adalah pewaris. Jamalul III dan Esmail adalah anak dari Datu Punjungan.<sup>48</sup>

Putri Denchurain, anak dari Putri Tarhata Kirama, mengakui kesembilan keturunan yang disebutkan di dalam keputusan Macaskie sebagai pewaris yang sah atas Sabah.<sup>49</sup> Pada tahun 1996, Putri Denchurai Kiram, menulis kepada Perdana Menteri Mahathir untuk menaikkan uang sewa menjadi 1 juta Dollar AS. Tetapi dia juga mengatakan bahwa ia dan keturunan sultan lainnya ingin menyerahkan klaim tersebut jika Kuala Lumpur menyediakan pengaturan yang adil. Surat Thee tidak ditanggapi oleh Mahathir. Pada bulan Juni 2010, Dewan Propinsi Sulu menyetujui sebuah resolusi yang mendukung tuntutan dari keturunan sultan untuk meningkatkan pembayaran tahunan sedikitnya 500 juta Dollar AS.<sup>50</sup>

Pada bulan Januari 2001, Sultan Esmail Kiram II, kakak dari Jamalul III, juga menulis surat kepada Mahathir, melalui Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Anak Putri Denchurain, Putri Tajmahal, juga ikut menandatangani. Menurut beberapa laporan, tuntutan mereka adalah 855 juta Dollar AS.<sup>51</sup>

## FAKTOR IDENTITAS

Dalam interaksi antarnegara bangsa, tidak biasanya kesultanan atau sistem monarki kecil berani berkonfrontasi dengan negara yang berdaulat seperti halnya dengan Malaysia. Hal yang lazim terjadi adalah negara melawan negara yang disebut perang atau berperkara ke pengadilan internasional atau pihak mediator untuk sengketa wilayah yang mereka perjuangkan. Datu Agbimuddin dan saudaranya Sultan Sulu, Jamalul Kiram III, telah menyatakan bahwa mereka di Lahad Datu mengunjungi "homeland" mereka.

Kelompok Sulu memilih jalan *non-dialog* dan *non-justice*. Secara fisik melawan negara kerajaan yang disebutnya telah kurang ajar membayar sewa tanah dengan harga yang tidak wajar. Juru bicara Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, memperlihatkan beberapa dokumen yang menunjukkan klaim Sulu atas Sabah. Dia juga menyertakan selebar cek senilai 69.700 peso atau hanya sekitar Rp16,6 juta, sebagai pembayaran sewa Sabah dari Malaysia. "Ini adalah cek yang dibayarkan oleh

<sup>48</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>49</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>50</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

<sup>51</sup>Amina Rasul, "The Sabah Standoff", <http://www.mindanews.com/mindaviews/2013/02/24/commentary-the-sabah-standoff>, 24 Februari, 2013

Kedutaan Besar Malaysia di Filipina. Nilainya setara 69.700 peso, untuk wilayah seluas 77.699 kilometer persegi," menurut Idjirani seperti dikutip ABC CBN News, Kamis 21 Februari 2013.

Menurut Abhoud Syed M. Lingga, "Kami (Bangsamoro dan Filipino) adalah dua bangsa yang berbeda memeluk dua ideologi yang berbeda, memiliki budaya yang berbeda, dan dibesarkan dalam pengalaman sejarah yang berbeda pula". Dengan demikian, menurutnya, Bangsa Moro dan Filipino memiliki konsepsi yang kontra-distingsi tentang kedaulatan. Bangsa Filipino percaya bahwa kedaulatan inheren di dalam diri mereka karena berasal dari Allah. "Lembaga-lembaga politik, sosial, ekonomi dan hukum yang mereka wariskan dari penjajah diatur berdasarkan pemisahan aspek-aspek spiritual dan duniawi, tidak sesuai dengan kami yang berdasar pada asas kesatuan Ketuhanan Yang Maha Berdaulat dan manusia adalah wakilnya."<sup>52</sup>

Kebudayaan Bangsamoro penuh dengan keyakinan-keyakinan Islam, doktrin dan prinsip-prinsip, secara diametris berbeda dengan budaya Filipino yang merupakan adopsi dari budaya penjajah Spanyol. "Seni, arsitektur, sastra dan musik kami, mempertahankan karakter Asia yang sama sekali tidak sama dengan mereka", ujar Abhoud.<sup>53</sup>

## PENUTUP

Kalangan Muslim di selatan Filipina mengklaim mereka adalah bangsa yang terpisah karena perbedaan identitas dan sejarah panjang kemerdekaan politik. Untuk mempertahankan kedudukan mereka, kelompok pembebasan Muslim menciptakan konsep Moro, yang sebelumnya digunakan Spanyol untuk penduduk Muslim di Mindanao dan Sulu. Bangsamoro saat ini telah berevolusi menjadi sebuah identitas nasional dari 13 kelompok etnis Muslim di Mindanao dan Sulu. Istilah ini telah diadopsi pada dokumen-dokumen resmi Organisasi Konferensi Islam (2001) dan digunakan pada Kesepakatan Perdamaian antara Pemerintah Filipina dan MILF.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Abhoud Syed M. Lingga, *Philippines: The Muslim Minorities*, [http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com\\_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=](http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=)

<sup>53</sup>Abhoud Syed M. Lingga, *Philippines: The Muslim Minorities*, [http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com\\_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=](http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=)

<sup>54</sup>Abhoud Syed M. Lingga, *Philippines: The Muslim Minorities*, [http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com\\_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=](http://www.seacsn.usm.my/index.php?option=com_content&view=article&id=128:philippines-the-muslim-minorities-abhoud-syed-m-lingga&catid=40&Itemid=350&showall=1&limitstart=)

Kepentingan ekonomi dan politik telah menjadi bahan bakar yang efektif bagi penguatan identitas Bangsamoro. Dalam hal ini, Kesultanan Sulu memanfaatkan momen yang tepat untuk mengklaim kembali apa yang mereka anggap sebagai wilayah mereka, yaitu Sabah. Pendudukan mereka atas wilayah Sabah pada awal 2013 menjadi penanda “*kepulangan*” mereka ke *homeland* mereka, terlepas dari faktor-faktor ekonomi dan politik di baliknya yang juga menjadi unsur penentu dari tindakan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Crawford B. (2007). *Globalization and Cultural Conflict: An Institutional Approach*. In H. Anheier and Y. R. Isar (Eds.), *The Cultures and Globalization Series: Conflicts and Tensions*. Thousand Oaks CA: Sage.

Posen, B. R. (1993). *The Security Dilemma and Ethnic Conflict*. In M. E. Brown (Ed.), *Ethnic Conflict and International Security*. Princeton N. J: Princeton University Press.

Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

### JURNAL

Bozdaglioglu, Yucel. *Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach*. Review of International Law and Politics (RILP), Vol. 3, No: 11, 2007.

Fearon J. and Laitin D.(2000). *Violence and the Social Construction of Ethnic Identity*. *International Organization* 54 (4).

Wendt, A. *Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics*. *International Organization*, 46 (2).

### SURAT KABAR

Masa Lalu yang Belum Tuntas di Sabah, Kompas, 5 Maret 2013.

Sangat Sulit Selesaikan Masalah Sulu, Kompas, 23 Maret 2013.

*Klaim Wilayah Sulu Buka Kotak Pandora*, Kompas, 13 Maret 2013

*RI Diharapkan Berperan*, Kompas, 22 Maret 2013.

*PM Malaysia: Pintu Negosiasi Tertutup*, Kompas, 3 Maret 2013

### INTERNET

Abyad, Wafa. *The Role of Identity in International Relations*, April 10, 2010, <http://www.internationalpeaceandconflict.org>, diakses tanggal 11 Maret 2013

Sixto Y. Orosa, MD (1931), "The Sulu archipelago and its people", New York: Yonkers-on-Hudson

Najeeb M. Saleeby (1908), "The History of Sulu", Manila: Bureau of Printing

Datu Andres Linholm (2011), "The recorded genealogy of Royal House of Sulu", London